



# KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323  
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/ 540 /AA.05/2019  
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019

30 Desember 2019

Yth. Wali Kota Serang  
di

Serang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Badan Pengawas Keuangan dan Pembagunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten atas nama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melaksanakan evaluasi atas penerapan SAKIP Pemerintah Kota Serang Tahun 2019. Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi ditujukan untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.**

Hasil evaluasi Pemerintah Kota Serang mendapat nilai **54.64** atau dengan predikat penilaian "CC". Hasil evaluasi secara rinci dapat dilihat pada Laporan Hasil Evaluasi yang disampaikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten. Guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja pada tingkat pemerintah daerah dan Perangkat Daerah (PD), kami mengharapkan Wali Kota Serang untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan tersebut.

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Serang. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Serang. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Saudara.

Depus Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas  
Aparatur dan Pengawasan



Muhammad Yusuf Atoh

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Banten.